

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan Polri yaitu Sekolah Polisi Negara yang disingkat dengan SPN tidak hanya berada pada satu tempat, akan tetapi menyebar di beberapa propinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah 19 buah, yakni :

1. Sekolah Polisi Negara Seulawah – Aceh,
 2. Sekolah Polisi Negara Sampali – Sumut,
 3. Sekolah Polisi Negara Padang Besi – Sumbar,
 4. Sekolah Polisi Negara Pekanbaru – Riau,
 5. Sekolah Polisi Negara Pontianak – Kalbar,
 6. Sekolah Polisi Negara Betung – Sumsel,
 7. Sekolah Polisi Negara Lido – Jabar,
 8. Sekolah Polisi Negara Cisarua - Bandung,
 9. Sekolah Polisi Negara Purwokerto – Jateng,
 10. Sekolah Polisi Negara Banyubiru – Jateng,
 11. Sekolah Polisi Negara Mojokerto – Jatim,
 12. Sekolah Polisi Negara Singaraja – Bali,
 13. Sekolah Polisi Negara Kupang – NTT,
 14. Sekolah Polisi Negara Balikpapan – Kaltim,
 15. Sekolah Polisi Negara Banjar Baru – Kalsel,
 16. Sekolah Polisi Negara Batua – Sulsel,
 17. Sekolah Polisi Negara Karombasan – Sulut,
 18. Sekolah Polisi Negara Passo – Maluku,
 19. Sekolah Polisi Negara Jayapura – Irija.
- Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Medan merupakan satu dari 19 tempat SPN diselenggarakan, memiliki tanggung jawab untuk melahirkan polisi-polisi yang profesional, produktif, dan kualitas, hal ini memerlukan penanganan yang profesional, dan ini tidak terlepas dari orang-orang yang mengelola secara

terorganisir. Hal inilah merupakan fokus penelitian yang akan melihat bagaimana Pola Perilaku Kepemimpinan Kepala SPN Sampali Medan.

Faktor perlunya pendidikan polisi dilatar belakangi pentingnya polisi yang profesional sebagai satuan pengaman di tengah masyarakat atas kejadian yang terjadi yang tak terlepas dari kemajuan perkembangan peradaban manusia. Adanya kesenjangan sosial terjadi mengakibatkan perselisihan di tengah masyarakat baik antar golongan, ataupun pribadi yang menuntut hak antara satu dengan yang lain, dan kejadian atau fenomena lainnya sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan, pemberontakan dan tindakan lainnya yang merugikan pihak yang mengalaminya. Keresahan lain juga terjadi di tengah masyarakat yakni dengan merebaknya perjudian dengan berbagai jenis permainan, baik dilakukan secara kecil-kecilan atau besar-besaran dan yang terlibat dalam hal ini bukan hanya pada batasan kalangan orang dewasa saja bahkan sudah sampai pada kalangan anak-anak. Kasus yang berkembang ditengah masyarakat yang meresahkan generasi bangsa adalah NARKOBA (Narkotik dan Obat Bius). Penggunaan Narkoba dapat menimbulkan berbagai efek seperti merusak moral, mental, dan mengganggu kesehatan tubuh sipengguna yang dapat mengakibatkan kematian, dan juga dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pencurian dan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan bagi pecandu Narkoba. Hal ini perlu penanganan khusus yang dimulai dari lingkungan keluarga sampai kepada pihak keamanan.

SERGAP disiarkan di RCTI jam 12.00, lewat siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan radio swasta serta berita koran yang menerbitkan berita kejadian kriminal. Untuk mengatasi masalah diatas dituntut profesionalisme Polri dan hal ini berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Polri. Sehingga tercipta masyarakat yang aman, damai dan tentram, dan tidak terusik kehidupannya.

Belum lagi kejadian pada lalu-lintas jalan raya yang sering terjadi tabrakan, terlebih-lebih tabrak lari atau ada kasus yang diselesaikan ditempat bagi pelanggar rambu lalulintas. Kejadian ini perlu mendapat perhatian oleh aparat yang berkopentent pada bidang itu diantaranya polisi.

Untuk menjalankan tugas seorang polisi haruslah mencapai tujuan Polri yakni untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentramaan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. (Ps.2 UU No. 27/97).

Membaca hal di atas jelaslah tertuang akan visi dan misi dalam Polri, dimana menurut Djunaidi (1999) ada 3 (tiga) Visi Polri yang menggambarkan masa depan yang dicita-citakan adalah : 1. Polri yang profesional sebagai aparat penegak hukum, 2. Polri dicintai masyarakat, 3. Polri yang bersih dan berwibawa. Ketiga visi tersebut akan menjiwai semua kegiatan, Ethos kerja dan perilaku anggota Polri.

Sedangkan misi Polri yang menjadi tugas pokok ada 3 (tiga), yang telah diatur tertuang pada UU No. 27 tahun 1997, yakni 1. Penegak hukum, 2. Perlindungan dan pelayanan masyarakat, 3. Pembimbing masyarakat dalam rangka tejaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. (Ps. 3 UU No. 27/97).

Dengan demikian visi dan misi Polri harus dibuat menjadi arah kemana Polri akan berbuat. Visi berkaitan dengan citranya dan misi adalah tugas yang harus dikerjakan. Apabila visi dan misi tersebut ditanamkan secara baik pada diri anggota Polri, maka semua perbuatan akan mengarah kepadanya.

Untuk melahirkan anggota Polri yang sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan perlunya lembaga pendidikan khusus mengenai kepolisian. Karena pendidikan kepolisian ini merupakan pendidikan kedinasan maka harus disesuaikan seperti yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusus Pendidikan Kedinasan yang isinya sebagai berikut :

1. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
2. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
4. Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (Pasal 29)

Sesuai ayat 2 pasal 29 UU. RI. No. 20, Tahun 2003 di atas maka peran lembaga pendidikan kepolisian ini harus memberikan muatan tiga unsur yakni

1. *kognisi* dengan melalui pelajaran yang memberikan pengetahuan tertentu,
2. *afeksi* yang dibeikan melalui latihan-latihan dari pelajaran yang telah diberikan, sehingga mereka tahu benar dan terampil, dan
3. *konasi* yang diberikan melalui pengasuhan, yang selalu memberikan semangat untuk berkeinginan menjadi anggota polri yang baik. Atau memberikan sosok Polri yang perlu diteladani, sehingga akan menimbulkan semangat meniru seperti tokoh idolanya. (Djunaidi, 1999).

Apabila lembaga pendidikan Polri gagal memberikan muatan ketiga unsur tersebut jelaslah pendidikan itu hanya akan menciptakan anggota Polri menjadi kurang baik, tidak profesional, produktif, serta cenderung penyalahgunaan wewenang.

Salah satu satuan kerja dalam lembaga pendidikan Polri yang berada di Medan adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali yang menangani pendidikan bintara polisi. Agar tidak menemui kegagalan dalam memproduksi atau melahirkan polisi yang profesional tidak terlepas dari pengelolaan yang profesional oleh semua pihak atau personil polisi yang ada di lingkungan SPN Sampali itu sendiri dan ini tidak terlepas juga dari pimpinan yang dapat mengorganisir seluruh sistem kependidikan polisi dan juga cara perilaku pimpinan dalam memimpin agar suasana kerja harmonis dan berjalan dengan lancar.

. Berdasarkan pendapat Hersey dan Blanchard (1988) yang menjelaskan *“Leadership occurs any time one attempts to influence the behavior of an individual or group”*. Dengan kata lain pimpinan harus dapat aktif menjalankan kepemimpinan pendidikannya dan dapat mengambil keputusan yang tepat, sebagai seorang diteladani, dapat berkomunikasi, motivasi, mengkoordinasi, membagi tugas, membina dan lainnya bagi anggotanya dan terlebih instruktur yang akan menangani langsung siswa sebagai calon polisi yang bermutu dan tanggung sehingga tercipta pemimpin yang efektif.

Fenomena di atas merupakan hal yang menarik untuk diteliti, kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan fokus penelitian, yang akan melihat langsung bagaimana sesungguhnya pola perilaku pemimpin Kepala SPN Sampali Medan dalam memimpin seluruh pesonil untuk melahirkan polisi seperti yang diharapkan berdasarkan visi dan misi Polri serta masyarakat, yang signifikansi pada efektifitas kepemimpinan dalam menentukan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan kerjasama antar unit yang meliputi proses administrasi, pembinaan personil, keuangan, pengajaran, sarana dan prasarana yang akan bermuara pada tingginya mutu lulusan SPN Sampali Medan sebagai aparat keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan penelitian ini difokuskan pada :

“ Pola Perilaku pemimpin dan kepemimpinan kepala Sekolah Polisi Negara Sampali Medan”

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pola perilaku pemimpin dan kepemimpinan di Sekolah Polisi Negara Sampali Medan ?
2. Bagaimanakah pemimpin melaksanakan bimbingan bagi para tenaga pendidik di SPN Sampali Medan ?

D. Batasan Istilah

Adapun yang menjadi batasan istilah terhadap permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pola Perilaku kepemimpinan kepala SPN Sampali yang akan diteliti menyangkut pada syarat dan cara/gaya memimpin oleh Kepala SPN Sampali Medan .
2. Pelaksanaan bimbingan merupakan bentuk pelatihan atau program khusus yang dibuat untuk tenaga pendidik oleh Kepala SPN Sampali dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan SPN Sampali.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pola perilaku kepemimpinan di Sekolah Polisi Negara Sampali Medan.
2. Menjelaskan pelaksanaan bimbingan bagi para instruktur oleh pemimpin SPN Sampali Medan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi Lembaga Pendidikan dan latihan Mabes POLRI sebagai bahan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala SPN Sampali Medan.
2. Bagi kepala Polda Sumatera Utara sebagai masukan dalam meningkatkan pembinaan terhadap kepala sekolah kepolisian SPN Sampali dan jajarannya sehingga lebih baik di masa mendatang.
3. Bagi Kepala Sekolah Polisi Negara Sampali Medan untuk masukan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di masa mendatang.

G. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan perilaku aktor yaitu kepala Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Sampali Medan, dengan nara sumber dari para pembantu kepala SPN, para instruktur, seluruh personil dan para siswa, yang akan melihat tentang perilaku kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala SPN Sampali sebagai satu situasi sosial di Sekolah

Kepolisihan Negara Sampali Medan. Sesuai menurut Spradley (1980), bahwa penelitian kualitatif lebih tepat digunakan pada penelitian perilaku/budaya pada suatu situasi sosial. Demikian juga Williams (1989) yang menyatakan bahwa, penelitian kualitatif metode yang efektif untuk mengetahui; 1. makna-makna perilaku individu, 2. deskripsi suatu situasi sosial dan inteaksinya yang kompleks yang dilakukan individu (aktor), 3. pengkajian untuk menemukan informasi baru, 4. fokus yang mendalam dan rinci dari sesuatu yang terbatas jumlahnya, 5. deskripsi dari fenomena yang digunakan untuk menyusun teori, 6. fokus pada interaksi individu dan prosesnya, 7. uraian yang dengan konteks dan kesimpulan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1989) bahwa penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi/uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku aktor yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami makna pola perilaku pemimpin dalam memimpin dan peristiwa kepemimpinan yang terjadi sesuai latar sosial (*social setting*) di SPN Sampali Medan

Sejalan dengan hal di atas Faisal (1990) berpendapat bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (*inner behavior*) secara holistik dan bertolak dari sudut pandang manusia pelakunya.

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen (1982) yaitu : 1. latar alamiah sebagai sumber data, 2. peneliti adalah instrumen kunci, 3. penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, 4. peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, 5. makna yang dimiliki

pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (1989) bahwa sampel pada penelitian kualitatif ialah sampel bertujuan (*purposive sample*) dimaksudkan menjangkau informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya sehingga dapat dirinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Penetapan informan di atas sebagai sampel penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keterlibatan mereka terhadap aktivitas kepemimpinan yang dilakukan kepala SPN Sampali Medan.

Berdasarkan pendapat para tokoh kualitatif dimana fokus penelitian ini adalah pola perilaku pemimpin dan kepemimpinan Sekolah Polisi Negara Sampali Medan lebih sesuai menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian kualitatif adalah interaksi aktor-aktor dan prosesnya, bukan produk/hasilnya.

Sesuai dengan pernyataan Bogdan dan Biklen (1982); Lincoln dan Guba (1985) serta Nasution (1988) peneliti juga tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi secara alamiah dalam arti tidak dikondisikan atau dimanipulasikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinamakan juga *naturalistic inquiry* atau inkuiri (penyelidikan) alamiah (Guba & Lincoln, 1981). Bogdan & Taylor (1993) menyatakan bahwa, tujuan penelitian kualitatif untuk membentuk pemahaman-pemahaman yang rasional dan gamblang mengenai kebenaran dan realita. Peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi melalui observasi terhadap fenomena, serta makna yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, seperti dikatakan Faisal (1990); Williams (1989); dan

Branen (1992), bahwa kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dan penelitian deskriptif tidak menggunakan serta tidak melakukan pengujian hipotesis (Faisal, 1995).

H. Latar Penelitian

Untuk menggambarkan situasi sosial yang sebenarnya, perlu ditentukan latar penelitian. Spradley (1980) menjelaskan "*all situation involves the three primary elements of place, actors and activities*". Dapat dipahami bahwa satu situasi sosial itu terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, aktor-aktor (pelaku) dan kegiatan.

Adapun situasi sosial di SPN Sampali yang lokasinya di Jalan Bhayangkara Medan, terdiri dari para aktornya yaitu : 1. kepala SPN, 2. unsur pimpinan lainnya wakil kepala SPN serta kepala tatasaha (KTU), 3. para pelatih, 4. seluruh personil, dan 5. para siswa.

Sedangkan tempat yang menjadi lokasi aktor melakukan aktivitas, yaitu : 1. ruang kantor kepala SPN sampali dan wakil kepala, 2. ruang kantor para pelatih, 3. ruang tatasaha, 4. ruang kelas, 5. ruang ibadah , dan lain-lain.

Adapun aktivitas yang dilakukan para aktor terdiri dari: 1. kegiatan memimpin, mempengaruhi, menggerakkan dan mengkoordinir personil SPN, 2. kegiatan administrasi, 3. kegiatan membina pelatih dan pegawai, 4. kegiatan belajar mengajar di kelas, 5. kegiatan musyawarah pelatih di ruang rapat, dan 6. kegiatan rohani.